

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur:

- Akub M Syukuri, Baharu Baharuddin. 2012. *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- AM Mendrofa. 2003. *Pembahasan Penerapan KUHP oleh Penyidik dan Penyidik Pembantu*. Jakarta: Sekolah Polisi Negara.
- Artasasmita, Romli. 1983, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana. Jakarta: Bina Cipta.
- Badan pembinaan Hukum Nasional. 2011. *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Jakarta.
- Bell B William. 2002. *Practical Criminal Investigations in Correctional Facilities*. Boca Raton-New York: CRS Press.
- Cassese, Antonio. 1994. *Hak-hak Asasi Manusia di Dunia Yang Berubah, Terjemahan A.Rahman Zainuddin*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Gaffar M Janedri. 2009. Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem Ketatanegaraan republik Indonesia. Surakarta.
- Hamzah, Andi. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah, Andi. 2009, Hukum Acara Pidana Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Chandra. 2014. *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
- Harahap M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan*. Sinar Grafika: Jakarta
- Harahap M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*.
- Hiariej, Eddy. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga
- Husin Kadri, Husin Rizki. 2012. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung

- Lamintang P.A.F dan Lamintang Theo. 2010. *Pembahasan KUHAP (Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Laden. 2009. *Proses Penanganan perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Mahmud, Peter. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Mulyadi. Lilik. 2007. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Nugroho, Hibnu. 2011. *Bunga Rampai Penegakan Hukum Di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Pangaribuan, Luhut. 2008. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Djambatan
- Projodikoro, Wirjono. 1976. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sumur Badung.
- Rukmini Mien. 2003. *Perlindungan Ham Melalui APTB dan APKDH Pada Sistem Peradilan di Indonesia*, Bandung: Alumni Press.
- Sasangka Hary, Rosita Lily. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Simanjutak, Nikolas. 2009. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Simorangkir J.C.T, dkk. 2006. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru
- Soekanto Soerdjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sofyan, Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education
- Soemitro, Hanitijo, Ronny. 1983. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soeparmono R. 2003. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP*. Bandung: Mandar Maju.
- Soesilo R. 1982. *Hukum Acara Pidana (Prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*. Bogor: Politeia
- Sumartini L. 1996. *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Nasional Tentang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Umar Dzulkifli, Handoyo Usman. 2010. *Kamus Hukum*. Jakarta: Quantum Media

Wasserman, Rhonda. 2004. Dalam *Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States Constitution*. Santa Barbara: Greenwood Publishing Group.

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

_____, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

_____, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

_____, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

_____, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

_____, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

_____, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

_____, Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kapolri, No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kapolri, No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Kapolri,, Keputusan No. Pol.SKEEP/04/I/1982

Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali

Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya:

Sinarmata, Berlian. 2011. "Pengawasan terhadap pelaksanaan Penahanan Menurut KUHAP dan Konsep RUU KUHAP". *Mimbar Hukum*. Volume 23 nomor 1.

- Lapasi, Daud. 2016. "Penetapan Tersangka Berdasarkan Bukti Permulaan yang Cukup". *Jurnal Lex et Societatis*. Nomor 2 Volume 4
- Moeliono P Tristam. 2015. "Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritikan terhadap Putusan MK tentang Praperadilan". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Nomor 4 Volume 22: 13-14
- Putri, Akria, Novita. 2015. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Penambahan Norma Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Razi, Fachruddin. 2016. "Mekanisme Pemenuhan Hak Tersangka Melalui Penetapan Tersangka Menjadi Objek Pra Peradilan". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Nomor 2 Volume 16.
- Ritonga Zefania Rena, Boong Retnowati Vicariya. 2012. "Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume XVII No. 2 .
- Sekretariat Jendral DPR RI. 2014. "Polemik Pembahasan RUU KUHP dan RUU KUHP". *Info Singkat Hukum*. Vol. VI, No. 05/I/P3DI/Maret/2014.
- Simbolon, Gomgoman. 2016. "Analisis Hukum Atas Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dalam Kaitan Dengan Wewenang Lembaga Peradilan (Studi Kasus: Perkara Peradilan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel.)". *USU Law Journal*. Vol.4.No.2
- Siregar, Al Amin, Efendy, Rahmat. 2015. "Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Kaitannya Dengan Perlindungan Ham". *Fitrah*. Vol. 01 No. 1.
- Umboh, Jeheskiel, Prisco. 2013. "Fungsi Dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana". *Lex Crimen*. Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013

Internet dan Sumber Lain:

- Aziezie, Tanziel, Muhammad. 2015. *Beberapa Catatan Atas PERMA No. 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan*. <https://kanggurumalas.com/2016/05/24/beberapa-catatan-atas-perma-4-tahun-2016-tentang-larangan-peninjauan-kembali-putusan-praperadilan/> diakses tanggal 12 Januari 2016
- Hitori, Ali. 2015. Hak Habeas Corpus untuk Praperadilan http://www.kompasiana.com/www.hitori.com/hak-habeas-corpus-untuk-praperadilan_54f35f88745513982b6c736e. Diakses tanggal 311 Januari 2017

Huda, Chairul. 2015. *Pemahaman Tentang Alat Bukti Sebagai “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan Sebagai “Bukti yang Cukup”*. <http://www.fianhar.com/2016/03/pemahaman-tentang-alat-bukti-sebagai.html> diakses pada tanggal 15 Desember 2016

Indonesia Corruption Watch. 2016. “Eksaminasi Putusan PN Jakarta Selatan Dalam Gugatan Praperadilan Budi Gunawan VS KPK Melawan Penetapan Tersangka”. *Seri Eksaminasi Putusan*. 01-2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014